

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Variabel utama dalam penelitian ini, adalah Akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan desa di Dese Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan desa adalah bentuk pertanggungjawaban Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan melalui pelibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berdasarkan asas transparansi. Adapun indikator yang akan diteliti adalah (1) Ada tidaknya keterlibatan masyarakat desa dalam suatu perencanaan pembangunan, (2) Ada tidaknya keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, (3) ada tidaknya keterlibatan masyarakat desa dalam evaluasi pembangunan melalui LKPD Kepala Desa.

Indikator tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumen tasi untuk dapat menganalisis Akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.

5.1 Ada Tidaknya Keterlibatan Masyarakat Dalam Suatu Perencanaan

Pembangunan Desa

Sesuai Dengan latar belakang masalah dalam kaitan dengan keterlibatan masyarakat desa dalam proses perencanaan pembangunan desa maka untuk mengetahui hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Nasrun Nama Paron selaku ketua BPD Desa Pledo bahwa:

“Dalam semua proses perencanaan pembangunan yang ada di Desa Pledo masyarakat selalu kami libatkan karena sebagai pemerintah Desa kami harus bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa .”¹

Menurut Bapak Yohanes Gawi Oran selaku anggota Karang Taruna Desa Pledo mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan pembangunan desa terkait Pembangunan Pasar Senja dan Bumdes tidak semua masyarakat desa dilibatkan, akan tetapi masyarakat hanya dilibatkan pada saat perencanaan kegiatan pembangunan desa yang lain seperti Pembangunan Bak Sampah RT, Pembangunan Jalan Pemukiman Desa, Renofasi Jaringan Air Bersih Desa, Rehabilitasi Kantor Desa dan Renofasi Gedung POSKESDES dan itu semua di beritahukan secara langsung lewat corong desa”.²

Wawancara dengan Bapak Yulianus Tokan selaku ketua karang taruna

Dalam perencanaan pembangunan di desa tidak semua masyarakat di libatkan seperti rencana pembangunan pasar senja desa dan BUMDes sehingga dalam berjalannya waktu semua yang diharapkan tidak berjalan dengan baik. Bapak yulianus Tokan juga mengatakan bahwa ada factor penyebab yang lain seperti perekrutan tenaga kerja BUMDes yang tidak tepat atau bisa di katakana hanya merekrut siapa saja tetapi tidak melihat kemampuan yang di miliki.³

¹wawancara dengan Bapak Nasrun Nama Paron selaku ketua BPD Pledo tanggal 11 april 2019.

²wawancara denganBapak Yohanes Gawi Oran selaku anggota Karang Taruna Desa Pledo 13 april 2019

³ Wawancara dengan Bapak Yulianus Tokan selaku Ketua Karang Taruna 14 april 2019.

Menurut Ibu Leni Marselina selaku anggota PKK, mengatakan bahwa:

“Setiap perencanaan pembangunan desa hanya di ikuti oleh ketua PKK dan sekretaris sedangkan kami sebagai anggota tidak dilibatkan sama sekali .

“4

Menurut Bapak Kopong Boro selaku tokoh adat di Desa:

“Setiap proses perencanaan pembangunan di desa pledo saya sebagai Tokoh Adat tidak libatkan. Keterlibatan saya hanya sebatas menangani masalah atau hambatan serta mencari jalan keluar yang berkaitan dengan kepemilikan tanah ketika ada kegiatan pembuatan jalan desa”⁵

Menurut Bapak Syamsudin Samon Deran selaku Kepala Desa Pledo

“Dalam setiap perencanaan pembangunan desa selalu di beritahukan lewat corong desa secara langsung, masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dengan baik. Semua kegiatan menyangkut pembangunan desa di laksanakan berdasarkan hasil keputusan musyawarah bersama. Selama ini, baik perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua kegiatan yang telah kami laksanakan berjalan lancar. Dengan adanya system pemerintahan yang trnsparan dan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga apapun kegiatan membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.”⁶

Menurut ibu Samsidar Uba Deran selaku ketua PKK desa pledo,

“Bahwa setiap kegiatan pembangunan di desa pledo mulai dari perencanaan selalu melibatkan masyarakat dan saya sebagai ibu PKK dan sekretaris PKK desa Pledo juga di undang untuk hadir mengikuti kegiatan perencanaan pembangunan desa.”⁷

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Lorens Take Tokan selaku Ketua

Kelompok tani

“Saya sebagai masyarakat dan selaku ketua kelompok tani merasa tidak dilibatkan ketika ada musyawarah tentang perencanaan pembangunan desa. Jangankan pengumuman lisan yang di umumkan melalui toa desa. Sekalipun saya di undang secara tertulis saya tidak akan hadir karena sesuai dengan pengalaman saya bahwa setiap ada musyawarah perencanaan pembangunan desa, setiap usul atau saran dari

⁴ wawancara dengan Ibu Leni Marselina selaku anggota PKK 15 april 2019.

⁵ Wawancara dengan Bapak Kopong Borho selaku tokoh adat di Desa Pledo 17 april 2019.

⁶ Wawancara dengan Bapak Simon Samon Deran selaku Kepala Desa Pledo 9 april 2019.

⁷ Wawancara dengan Ibu Samsidar Uba Deran selaku ketua PKK desa pledo 20 april 2019.

warga masyarakat lain yang bukan aparat desa tidak pernah di terima untuk di pertimbangkan dan di musyawarakan.⁸

Menurut Ibu Ester Rari Peka selaku anggota BPD

“Untuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa pledo, masyarakat di ikut sertakan dan terlibat dalam perencanaan pembangunan desa karena untuk mencapai suatu kesepakatan harus ada partisipasi dan kerja sama yang baik.”⁹

Menurut bapak Fransiskus Jais Tokan selaku ketua RT 04.

“Dalam proses perencanaan pembangunan desa kami sebagai masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa misalnya pembangunan pasar senja dan BUMDes. Seharusnya pemerintah desa pledo menggandeng dan bekerja sama dengan masyarakat karena hal ini berkaitan dengan pembangunan yang ada di lewotengah”.¹⁰

Wawancara dengan Ibu Oktaviana Pulo Geon selaku ketua RT 03¹¹.

“Dalam perencanaan pembangunan di desa seperti Pasar senja dan BUMDes saya dari pihak RT tidak dilibatkan sama sekali. Mengenai pembangunan yang saat ini tidak berjalan dengan baik seperti pasar senja yang macet menjadi tanda tanya yang harus di pertanyakan kepada pemerintah desa.

Wawancara dengan Bapak Yohanes Bahi selaku ketua RT 05¹²

“Dalam proses perencanaan di desa kami tidak di libatkan. Untuk pimpinan sekarang ini, kami sebagai ketua RT tidak merasa bahwa kami adalah aparat desa karena tugas sebagai ketua RT pun kadang kami tidak tahu jelas apa yang harus kami kerjakan. Kami hanya merasa menjadi RT saat pembagian raskin saja karena disana tugas kami membagikan beras sesuai anggota masyarakat di RT masing - masing”.

Wawancara dengan Bapak Didakus Kopong Tura selaku ketua RT 06¹³

Dalam proses perencanaan di desa, kami tidak di libatkan dan sayang sekali pembangunan seperti pasar senja di desa macet atau tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya pembangunan pasar dapat membantu masyarakat berjualan atau membeli di sana. Akan tetapi, sekarang pasar tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Seharusnya pemerintah desa terbuka dengan kami supaya kita semua bersama – sama dapat mencari solusi. Sayang sekali bangunan yang sudah di bangun dengan begitu banyak dana tetapi tidak di manfaatkan dengan baik.

Wawancara dengan Bapak Antonius Nuho Paron selaku ketua RT07¹⁴

⁸ wawancara dengan Bapak Lorens Take Tokan selaku Ketua Kelompok tani 24 april 2019.

⁹ Wawancara dengan Ibu Ester Rari Peka selaku anggota BPD 27 april 2019.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Fransiskus Jais Tokan selaku ketua Rt 04 , 5 april 2019.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Oktaviana Pulo Geon selaku ketua RT 03, 4 april 2019.

¹² Wawancara dengan Bapak Yohanes bahi selaku ketua RT 05, 22 april 2019.

¹³ Wawamncara dengan Bapak Didakus Kopong Tura selaku ketua RT 06. 27 april 2019.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Antonius Nuha Paron selaku ketua RT07, 28 april 2019.

Dalam proses perencanaan pembangunan di desa kami sebagai RT tidak di libatkan sama sekali makanya pada saat pelaksanaan pembangunan di desa banyak sekali masyarakat yang tidak terlibat atau tidak ikut berpartisipasi dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa khususnya pasar senja dan BUMDes di desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan serta tidak mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan pembangunan dimana yang dilibatkan hanya Pemerintah dan perangkat desa serta ketua dan Sekretaris PKK sedangkan masyarakat, Kelompok Tani, Karang Taruna, Tokoh Adat, Ketua RT dan sebagian warga masyarakat tidak dilibatkan sama sekali.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur belum melaksanakan aspek perencanaan yang baik dalam pembangunan sebagaimana yang di katakana oleh Malena at.all Pendekatan akuntabilitas social secara teratur menampilkan proses artikulasi dan negosiasi untuk kepentingan bersama, serta membangun komitmen yang meyakinkan bagi keterlibatan warga masyarakat. Mereka terdiri atas beberapa elemen penting, yang terdiri dari: (i) *mobilizing around an entry point* (mobilisasi di sekitar titik masuk) ,(ii) *building an information/evidence base*, (membangun basis informasi atau bukti) (iii) *going public*,(menjadi public) (iv) *rallying support and building coalitions*,(mengumpulkan support dan membangun koalisi) (v) *advocating and negotiating change*((mengadvokasi dan ,menegosiasikan perubahan) ¹⁵.

¹⁵ Priyo sudibyo Op.,cit. hal 11

Dan juga harus pada yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 79 ayat (1) yaitu Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dan 80 ayat 1 dan 2, yaitu, (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dan (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Hal ini berdampak pada pembangunan Pasar dan Bumdes tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan atau macet karena kurang mengedepankan aspek akuntabilitas social dalam penyelenggaraan pembangunan. agar perencanaan dapat sesuai dengan yang diharapkan maka perlu memperhatikan akuntabilitas social seperti yang dikemukakan oleh Malena at.all memberdayakan masyarakat melalui partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan hak, peran, dan tanggung jawab, serta meningkatkan ekspektasi masyarakat. Dalam upaya penyampaian *voices*, maka mekanisme akuntabilitas sosial pada umumnya terjadi secara *demand-driven* dan dioperasikan secara *bottom-up*.¹⁶

¹⁶Priyo Sudibyo, Op.cit,2015. Hal 11

Gamabar 5.1¹⁷
Kantor Desa Pledo dan Corong Desa.



Pada gambar 5.1 menunjukan bahwa pada proses perencanaan masyarakat di beritahukan secara langsung lewat corong Desa.

Gambar 5.2¹⁸
Daftar hadir Penyusunan Rencana RKPDes



Dari gambar di atas, dapat menunjukkan bahwa tidak adanya kehadiran masyarakat dalam kegiatan Penyusunsn Rancangan RKPDes. Yang hadir pada kegiatan tersebut hanya interen pemerintah desa pledo. Dilihat dari segi akuntabilitas sosial seharusnya masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan RKPDes.

¹⁷ Kantor Desa Pledo dan Corong Desa.

¹⁸ Gambar diambil pda tanggal 8 april 2019

Dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi di desa tentunya membutuhkan partisipasi dari masyarakat desa secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pembangunan tersebut harus tepat guna atau tepat sasaran yang di setuju melalui musyawarah bersama. Pendapat serta gagasan-gagasan yang dinilai memungkinkan adanya pembangunan yang berdampak pada jangka panjang menjadi rumit dan dapat tertunda. Akibatnya tujuan yang ingin capai menjadi terhambat.

Pada tahap perencanaan pembangunan di desa tentu ada dampak yang terjadi ketika masyarakat tidak di libatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa. Maka dari itu penulis melakukan wawancara terkait dengan dampak-dampak atau masalah apa saja ketika masyarakat desa tidak di libatkan dalam proses perencanaan musyawarah desa di desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Untuk mengetahui dampak atau masalah terkait tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa maka penulis melakukan wawancara kepada Bapak Kepala Desa Samsudin Samon Deran.¹⁹

“dalam proses perencanaan pembangunan desa masyarakat kami libatkan di sampaikan melalui toa desa tetapi tidak semua masyarakat yang hadir pada saat perencanaan tersebut. yang menjadi kendalanya pada pelaksanaan banyak yang tidak hadir dan itu menjadi tugas kami pemerintah desa untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dengan baik dalam proses pembangunan di desa.

¹⁹ wawancara kepada Bapak Kepala Desa Samsudin Samon Deran. 9 april 2019.

Untuk mengetahui dampak atau masalah terkait tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ketua BPD Nasrum Nama Paron.²⁰

“ Pada tahap perencanaan pembangunan kehadiran masyarakat sangat minim dalam musyawarah desa pada suda di sampaikan lewat pengumuman secara terbuka dari balaidesa lewat toa desa dan sebagian masyarakat yang hadir juga tidak disiplin waktu.makanya pada saat pelaksanaan masyarakat jaga banyak yang tidak ikut berpartisipasi dengan baik.

Untuk mengetahui dampak atau masalah terkait tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa maka penulis melakukan wawancara kepada Bapak

Karang Taruna, Bapak Yulianus Tokan mengatakan bahwa²¹

“Kendala yang dihadapi itu berupa partisipasi. Saya melihat selama ini bahwa masyarakat secara umum di Desa Pledo jarang sekali terlibat dalam kegiatan musyawarah bersama BPD dan pemerintah desa. Masyarakat lebih sibuk dengan urusan pribadi dan kelompok dari pada harus ikut musyawarah di kantor Desa.

Untuk mengetahui dampak atau masalah terkait tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa maka penulis melakukan wawancara kepada Bapak Kopong borho selaku tokoh adat di desa

“Untuk pembangunan desa saat ini dalam perencanaan saya melihat banyak sekali masyarakat yang tidak terlibat makanya ketika pada saat pelaksanaan pembangunan di desa banyak masyarakat yang tidak hadir untuk ikut berpartisipasi”

Untuk mengetahui dampak atau masalah terkait tidak ada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa maka penulis melakukan wawancara kepada Bapak Lorens Take Tokan selaku Ketua Kelompok tani

Dalam proses perencanaan pembangunan desa saya tidak di libatkan jadi pada saat pelaksanaan saya tidak ikut berpartisipasi dengan alasan pembentukan Pasar Senja dan BUMDes tidak di musyawakan oleh masyarakat.

²⁰ wawancara kepada Bapak Ketua BPD Nasrum Nama Paron.11 april 2019.

²¹ , Bapak Yulianus Tokan mengatakan bahwa 14 april 2019.

Dalam pemberian informasi mengenai hambatan-hambatan atau dampak yang dihadapi dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa yang mengakibatkan hasil pembangunan tidak berjalan sesuai yang diharapkan seperti pasar senja yang macet dan BUMDes tidak memiliki fasilitas yang baik atau berkembang secara baik, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa semua itu terjadi karena tidak ada keterbukaan atau transparansi antara pemerintah desa dengan warga masyarakat dalam musyawarah desa pada saat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa pledo.

Gambar 5.3²²
Bangunan BUMDes di Desa pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.



Gambar di atas menunjukkan kantor BUMDesa Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur sekarang ini

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa karyawan BUMDes bekerja tidak memiliki fasilitas yang memadai sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak maksimal. Hal ini karena pembentukan BUMDesa di Desa Pledo kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur tidak melalui musyawarah desa.

²² Gambar di ambil pada 21 April 2019

Gambar 5.4²³

Pasar Senja di Desa pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur.



Pada gambar di atas ini menunjukkan bahwa pasar senja desa pledo sangat ramai pengunjung maupun pembeli pada hari jumat tanggal 25 mei 2018

Gambar 5.5²⁴

Pasar Senja Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur Yang Tidak Dimanfaatkan Lagi



Pada Gambar di atas menunjukan bahwa pasar tidak berjalan lagi sesuai apa yang di harapkan (macet)

Pasar senja Desa Pledo di bangun atas Inisiatif Kepala Desa sendiri dan

di kelola oleh BUMDes (Bada Usaha Milik Desa), pasar senja saat ini

menjadi macet dan tidak berjalan sesuai dengan harapan akibat dari tidak

adanya musyawarah desa, artinya rencana pembangunan pasar desa tidak

tertuang Dalam APBDes Desa Pledo. Sementara masyarakat setempat tidak

pernah tahu sember dana untuk pembangunan pasar desa tersebut. masyarakat

menduga bawha dana yang di pakai untuk pembuatan pasar senjah di ambil

²³ Gambar di ambil pada jumad 25 mei 2018

²⁴ Pasar Senja Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur Yang Tidak Dimanfaatkan Lagi

dari Dana Desa Untuk membangun pasar tersebut . Hal ini menjadi salah satu kegagalan dalam proses pembangunan pemerintah Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur karena kurang mengedepankan aspek akuntabilitas sosial dalam menyelenggarakan pembangunan yang ada di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur.

5.2 Ada Tidaknya Keterlibatan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal ini pembangunan pasar senja dan BUMDes peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:

Wawancara dengan bapak Samsudin Samon Deran selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa dalam pembangunan pasar senja dan Bumdes sendiri sangat rendah serta kurangnya kesadaran dari masyarakat desa Pledo untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan, dimana yang hadir hanya segelintir warga saja sedangkan Pemuda dan Pemudi serta ibu-ibu tidak terlibat sama sekali dalam pembangunan.”²⁵

Wawancara dengan bapak Nasrum Nama Paron selaku Ketua BPD²⁶

”Partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan di desa sangat kurang, padahal sudah di beritahukan lewat corong desa .Dan saya melihat, jika masyarakat memiliki sifat kepedulian yang tinggi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa saat ini, maka semua akan berjalan dengan baik.

Wawancara penulis dengan Ketua Karang Taruna yaitu Bapak Yulianus

Tokan mengenai bentuk keterlibatan masyarakat :

“Keterlibatan masyarakat memang ada dari pemuda-pemudi yang terlihat dalam pembangunan fisik seperti pembuatan lapangan futsal, peduli lingkungan dan pembersihan jalan yang merupakan program dari

²⁵ wawancara dengan Kepala Desa Pledo bapak Samsudin Samon Deran 9 april 2019.

²⁶ Wawancara dengan bapak Nasrum Nama Paron selaku Ketua BPD 11 april 2019.

karang taruna. Sedangkan untuk pembangunan pasar senja dan Bumdes tidak ada sama sekali.”²⁷

Wawancara dengan Bapak Lorensius Take Tokan selaku ketua kelompok

Tani²⁸

Dalam pelaksanaan pembangunan di desa masyarakat sangat kurang berpartisipasi dalam pembangunan desa karena pada saat perencanaan, masyarakat tidak dilibatkan. Dari situlah sifat masa bodoh yang tinggi bagi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Dan saya sebagai ketua kelompok tani juga tidak terlibat penuh di dalam proses pelaksanaan tersebut. Bangunan yang saat ini macet dan tidak berjalan lagi seperti pasar senja di desa pledo membuat masyarakat sendiri menjadi hilang kepercayaan kepada pemerintah akan pembangunan desa ke depannya.

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat, penulis melakukan wawancara

dengan Ibu Rari Pekha sebagai anggota BPD :

“Keikutsertaan masyarakat desa dalam pembangunan fisik desa seperti pembangunan jalan, pembuatan lapangan futsal, pembuatan bak sampah dan gapura desa, pembangunan pasar senja dan Bumdes sangat rendah serta kurangnya semangat gotong royong dari masyarakat untuk bahu membahu dalam melaksanakan kerja di desa.”²⁹

Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat, penulis melakukan wawancara

dengan ibu Oktafiana Pulo Geon selaku ketua RT 03.

“Saya melihat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa sangat rendah, kurangnya kerja sama dalam pembangunan di desa serta kurang disiplin untuk datang tepat waktu pada saat kerja.”³⁰

Wawancara dengan Bapak Fransiskus Jais Tokan ketua RT 04³¹

“Menegenai pelaksanaan pembangunan di desa, masyarakat kurang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut karena dalam proses perencanaan juga kami tidak di ikut sertakan. Sehingga ketika ada pemberitahuan bahwa ada pelaksanaan pembangunan di desa, maka sifat masa bodoh dari masyarakat akan muncul”.

Wawancara penulis dengan tokoh adat yaitu bapak Kopong Boro mengenai bentuk keterlibatan masyarakat :

²⁷Wawancara dengan Bapak Yulianus Tokan selaku Ketua Karang Taruna 14 april 2019.

²⁸Wawancara dengan Bapak Lorensius Take Tokan selaku ketua kelompok Tani 24 april 2019.

²⁹Wawancara dengan Ibu Rari Pekha sebagai anggota BPD 27 april 2019.

³⁰wawancara dengan Bapak Oktafiana Pulo Geon selaku ketua RT 03, tanggal 4 april 2019.

³¹Wawancara dengan Bapak Fransiskus Jais Tokan ketua RT 04 tanggal 8 april 2019.

“Bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa hanya pada saat pelaksanaan musyawarah desa sedangkan dalam pembangunan fisik di desa sendiri seperti pembuatan jalan raya, bak sampah, gapura desa, pembangunan pasar senja dan Bumdes masyarakat banyak yang apatis atau masa bodoh dengan pembangunan yang ada.”³²

Wawancara penulis dengan Bapak Yohanes Bahi selaku RT 05

“Pada tingkatan keterlibatan masyarakat dalam hal pembangunan di desa masyarakat kurang berpartisipasi mengikuti kerja bakti atau pembuatan bak sampah, pembangunan pasar senja dan Bumdes.”³³

Wawancara dengan Bapak Didakus Kopong Tura selaku ketua

RT 06³⁴

Pelaksanaan pembangunan di desa saat ini kurang sekali masyarakat yang terlibat mulai dari muda mudi di desa dan para ibu-ibu di desa karena di lihat dari pemimpin sebelumnya masyarakat sangat terlibat sedangkan di lihat pada pembangunan sekarang ini sifat tidak peduli dari masyarakat sangat tinggi dan tidak terlalu ikut berpartisipasi di dalamnya dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan di atas maka

dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat tidak terlibat aktif dalam proses pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur. Hal tersebut peneliti perkuat dengan apa yang di kemukakan oleh Malena et.al yang mengatakan bahwa Konsep akuntabilitas sosial itu sangat erat berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, fungsi akuntabilitas sosial dalam reformasi administrasi adalah untuk memberdayakan masyarakat melalui partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara memberikan hak, peran, dan tanggung jawab, serta meningkatkan ekspektasi masyarakat. Dalam upaya penyampaian suara atau (*voices*), maka mekanisme akuntabilitas sosial pada umumnya terjadi secara *demand-driven* atau di dorong oleh pemerintah dan dioperasikan secara *bottom-up* atau dari bawah ke atas³⁵. untuk memperkuat mengatasi masalah di

³² Wawancara dengan Bapak Kopong Boro 17 april 2019.

³³ Wawancara penulis dengan Bapak Yohanes Bahi selaku RT 05 tanggal 22 april 2019.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Didsaku Kopong Tura selaku ketua RT 06 27 april 2019.

³⁵ Priyo Sudibyo, Op.cit,2015. Hal 11

atas maka proses pelaksanaan pembangunan desa di Desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur juga harus ,menjalankan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 81 ayat 1-5 tentang Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu :

1. Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
4. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
5. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Gambar 5.6³⁶
Pembuatan pasar senja Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten
Flores Timur



Gambar 5.3 menunjukkan bahwa sedikit sekali masyarakat berpartisipasi dan bekerja sama dalam proses pelaksanaan pembangunan pasar senjah desa pledo kecamatan witihama kabupaten flores timur.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa di butuhkan pasrtisipasi masyarakat yang aktif dan ikut terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tetapi pada kenyataannya dari kesimpulan di atas mengatakan bahwa masyarakat kurang terlibat atau berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan di desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Maka dari itu penulis melakukan wawancara terkait dengan Bagaimana cara pemerintah Desa Mendorong dan Merangsang Masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di desa.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Pledo Samsudin Samon Deran.

“Cara mendorong dan merangsang masyarakat merupakan hal yang gampang-gampang sulit, karena masyarakat pada kenyataannya memiliki sifat masa bodoh yang sangat tinggi ketika ada dorongan atau motivasi, karena menurut masyarakat yang terpenting itu adalah pelaksanaan atau kerja. Jadi cara yang biasa di lakukan pemerintah desa melakukan pendekatan emosional ke orang-orang yang berpengaruh atau yang bisa

³⁶ Gambar diambil padal 14 aprill 2018

merangkul masyarakat di desa. Cara lain yang juga biasa dilakukan oleh pemerintah desa adalah melakukan musyawarah bersama masyarakat. karena disanalah saat yang tepat untuk mendorong dan merangsang masyarakat dengan ajakan-ajakan maupun motivasi.”³⁷

Hasil wawancara penulis dengan ketua BPD bapak Nasrum Nama Paro.

cara untuk mendorong dan merangsang masyarakat dalam berpartisipasi untuk pembangunan di desa adalah membuka ruang kreatifitas untuk mengembangkan minat dan bakat serta mendukung penuh baik dalam bentuk dana maupun keterlibatan bersama secara langsung. Cara berikutnya yang biasa dilakukan adalah kunjungan ke RT untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung dan mendengar usul saran serta keluhan dari masyarakat.

Dari jawaban narasumber di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa sangat berperan penting dalam mendorong maupun merangsang masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam segala pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. Dari jurnal Ola Urbanus dan Tokan Frans Bapa yang berjudul *Pelembagaan Akuntabilitas Sosial Dalam Tata Kelolah Pemerintah Desa di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur*. Musyawarah bersama dalam masyarakat desa sebagai sebuah model pertanggung jawaban (*accountability*) terhadap tindakan pemerintah hampir tidak dikenal lagi. Padahal aspek fundamental dalam interaksi antara masyarakat desa dengan pemerintahnya adalah musyawarah dan gotong royong. Bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dijalankan lebih mengedepankan model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan versi negara. Pola pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa ini berpedoman pada pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban pemerintah desa yang diatur dalam Permendagri Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain: Permen No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri No.46 Tahun

³⁷ wawancara dengan Bapak Kepala Desa Pledo Samsudin Samaon Deran 9 april 2019.

2016 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa..³⁸Dalam hal ini, Akuntabilitas sosial merupakan pertanggung jawaban kerja seorang pemimpin yaitu pemerintah sebagai pelaksana dan masyarakat sebagai penerima manfaat Maka penulis menerangkan bahwa cara pemerintah mendorong dan merangsang masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akan lebih terarah. Gambar di bawa ini adalah dari salasatu pembangunan yang ada di desa pledo saat ini.

Gambar 5.7³⁹
Pembangunan jalan pemukiman desa di desa Pledo
Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur



Pada gambar ini termasuk salasatu pembangunan pemukiman jalan di desa pledo terlihat hanya segelintir masyarakat saja yang terlibat sedangkan pemuda pemudi dan ibu-ibu tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan pembangunan jalan pemukiman di desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur.

³⁸Ola,Urbanus, dan Tokan Frans Bapa,Op.cit.,2018.Hlm 1b

³⁹Pembangunan jalan pemukiman desa di desa Pledo Kecamatan Witiama Kabupaten Flores Timur.

Gambar 5.8⁴⁰
Renofasi air bersih di desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur



Pada gambar ini terlihat hanya beberapa masyarakat saja yang terlibat serta kurangnya partisipasi, kerja sama dan semangat gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan renovasi air bersih di desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

5.3 Ada tidaknya keterlibatan masyarakat desa dalam evaluasi pembangunan melalui LKPJ Kepala Desa.

Terkait dengan indicator ini peneliti melakukan wawancara pada beberapa informen untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam evaluasi pembangunan desa melalui LKPJ Kepala Desa di Desa Pledo sebagai berikut:

Menurut Bapak Samsudin Samon Deran selaku Kepala Desa pledo

“Dalam evaluasi kegiatan pembangunan desa saya melibatkan masyarakat. Sebagai kepala wilayah saya harus bertanggung jawab kepada masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan desa. Biar bagaimana pun masyarakat harus tahu tentang tata kelola keuangan desa”⁴¹.

Wawancara dengan Bapak Nasrum Nama Paron selaku ketua BPD

“Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa. Namun, kehadiran masyarakat sangat minim. Saya sendiri tidak tahu kenapa masyarakat tidak dilibatkan dalam evaluasi pembangunan desa”⁴².

⁴⁰ Renofasi air bersih di desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

⁴¹Wawancara Bapak Samsudin Samon Deran selaku Kepala Desa pledo

⁴²Wawancara dengan Bapak Nasrum Nama Paron selaku ketua BPD

Wawancara dengan Bapak Kopong Boro selaku Tokoh Adat di desa

“Evaluasi kegiatan pembangunan desa saya tidak dilibatkan sama sekali. Terus terang saya merasa sangat kecewa dengan pemerintah desa sekarang ini. Saya membuat perbandingan bahwa kepemimpinan bapak kepala Desa periode yang lalu lebih bagus dari saat ini karena dari proses perencanaan sampai pada evaluasi kami masyarakat selalu di libatkan”⁴³.

Menurut Bapak Yohanes Bahi selaku ketua RT 05

“Sebagai ketua RT pandangan bapak Yohanes Bahi atas keterlibatan pihak RT dalam pembangunan desa baik dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak ada sama sekali.”⁴⁴

Menurut bapak Didakus Kopong Tura selaku ketua Rt 06

“Pada saat musyawarah di desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan masyarakat di beritahukan lewat pengumuman yang di sampaikan secara lisan melalui corong desa dan sebagian masyarakat terlibat dalam tahap itu, akan tetapi pada saat evaluasi semua masyarakat tidak dilibatkan. Kami sebagai ketua Rt sama sekali tidak ikut berpartisipasi tahap evaluasi dan sampai pada saat ini saya juga tidak tahu mau buat apa karena tidak ada tugas yang di berikan oleh pimpinan.”⁴⁵
Menurut Bapak Antonius Nuho Paron selaku Ketua Rt 07

“Selama kepemimpinan kepala desa Syamsudin Samon Deran saya sebagai Ketua RT 07 dan masyarakat Desa Pledo pada umumnya, kami hanya hadir pada saat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang ada desa dengan ikut berpartisipasi sedangkan pada tahap evaluasi pembangunan kami tidak ikut berpartisipasi karena tidak di informasikan atau tidak di beritahukan kepada kami.”⁴⁶
Menurut ibu Oktafiana Pulo Geon selaku ketua RT 03.

“Pembangunan di desa pada tahap perencanaan sampai pada pelaksanaan saya ikut sedangkan pada tahap evaluasi ibu oktafiana mengatakan bahwa sebagai RT saya tidak dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan desa.”⁴⁷

Hasil wawancara dengan bapak Fransiskus jais Tokan selaku ketua

RT 04

⁴³Wawancara dengan Bapak Kopong Boro selaku Tokoh Adat di desa

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Bapak Yohanes Bahi selaku ketua Rt 05

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Didakus Kopong Tura selaku ketua Rt 06

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Antonius Nuha Paron selaku ketua Rt 07

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Okafiana Pulo Geonselaku ketua Rt 03

“Mengatakan bahwa selama kegiatan evaluasi pembangunan di desa saya sebagai RT merasa sangat kecewa karena tidak pernah di undang dalam proses evaluasi tersebut padahal proses evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam pertanggungjawaban proses pembangunan di desa”⁴⁸.

Berdasarkan wawancara di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat tidak dilibatkan dalam proses evaluasi pembangunan di desa. Sebagian masyarakat hanya di libatkan dalam peroses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Hal tersebut diperkuat oleh peneliti berdasarkan data daftar hadir pertanggungjawaban pembangunan desa di Desa Pledo Tahun 2018.

Gamabar 5.9⁴⁹

Table daftar hadir acara musyawarah mendengar keterangan pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa pledo

No	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Fransiskus Jais Tokan	Ketua RT 04	[Signature]
2	[Name]	[Description]	[Signature]
3	[Name]	[Description]	[Signature]
4	[Name]	[Description]	[Signature]
5	[Name]	[Description]	[Signature]
6	[Name]	[Description]	[Signature]
7	[Name]	[Description]	[Signature]
8	[Name]	[Description]	[Signature]
9	[Name]	[Description]	[Signature]
10	[Name]	[Description]	[Signature]
11	[Name]	[Description]	[Signature]
12	[Name]	[Description]	[Signature]
13	[Name]	[Description]	[Signature]
14	[Name]	[Description]	[Signature]
15	[Name]	[Description]	[Signature]
16	[Name]	[Description]	[Signature]
17	[Name]	[Description]	[Signature]
18	[Name]	[Description]	[Signature]
19	[Name]	[Description]	[Signature]
20	[Name]	[Description]	[Signature]
21	[Name]	[Description]	[Signature]
22	[Name]	[Description]	[Signature]
23	[Name]	[Description]	[Signature]
24	[Name]	[Description]	[Signature]
25	[Name]	[Description]	[Signature]
26	[Name]	[Description]	[Signature]
27	[Name]	[Description]	[Signature]
28	[Name]	[Description]	[Signature]
29	[Name]	[Description]	[Signature]
30	[Name]	[Description]	[Signature]
31	[Name]	[Description]	[Signature]
32	[Name]	[Description]	[Signature]
33	[Name]	[Description]	[Signature]
34	[Name]	[Description]	[Signature]
35	[Name]	[Description]	[Signature]
36	[Name]	[Description]	[Signature]
37	[Name]	[Description]	[Signature]
38	[Name]	[Description]	[Signature]
39	[Name]	[Description]	[Signature]
40	[Name]	[Description]	[Signature]
41	[Name]	[Description]	[Signature]
42	[Name]	[Description]	[Signature]
43	[Name]	[Description]	[Signature]
44	[Name]	[Description]	[Signature]
45	[Name]	[Description]	[Signature]
46	[Name]	[Description]	[Signature]
47	[Name]	[Description]	[Signature]
48	[Name]	[Description]	[Signature]
49	[Name]	[Description]	[Signature]
50	[Name]	[Description]	[Signature]

⁴⁸dengan bapak Fransiskus jais Tokan selaku ketua RT 04

⁴⁹ Table daftar hadir acara musyawarah mendengar keterangan pemerintah desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa pledo

Dari table di atas, dapat menunjukkan bahwa dari 1742 penduduk yang ada di desa pledo yang hadir dalam kegiatan tersebut hanya berjumlah 129 orang. Artinya tidak adanya kehadiran masyarakat dalam kegiatan evaluasi pertanggungjawaban pembangunan desa sangat minim.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pledo Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur tidak melaksanakan aspek evaluasi pembangunan di desa padahal dalam setiap pembangunan desa di butuhkan aspek transparan dan keterbukaan kepada masyarakat mengenai evaluasi pembangunan yang ada di desa seperti yang di kemukakan oleh Yudi Latif dan Henry Thomas Simarmata mengemukakan bahwa akuntabilitas sosial menunjuk pada warga negara yang bekerja bersama, untuk memastikan bahwa pemerintah menangani sumberdaya secara bijaksana, dapat diindra dan diuji (transparan), dan menjawab kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut ditegaskan bahwa dalam akuntabilitas sosial masyarakat memastikan bahwa pemerintah bekerja sungguh untuk rakyat. Proses ini membuat masyarakat mampu mendorong pemerintah bekerja untuk perkembangan dan kemajuan segenap pihak yang terkait dalam masyarakat.⁵⁰ Pemerintah desa pledo juga menjalankan aspek evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 82 ayat 1-5 tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yaitu :

1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

⁵⁰ Yudi Latif dan Henry Thomas Simarmata

3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Melihat bentuk evaluasi pelaksanaan pembangunan di atas, tentu ada bentuk-bentuk pembangunan yang ada di Desa Pledo saat ini . Maka dari itu, penulis melakukan tambahan wawancara terkait bentuk-bentuk pembangunan apa saja yang di bangun di desa Pledo saat ini.

Berikut ini adalah hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Desa Pledo yaitu Bapak Samsudin Samon Deran :

Ia mengatakan bahwa ada begitu banyak rencana pembangunan yang akan di laksanakan tetapi sampai pada saat ini masih ada beberapa rencana pembangunan yang belum di bangun. Sementara itu pembangunan yang telah di bangun adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Rumah Singga Kawasan Wisata
2. Pembangunan Gapura Tanda Batas Desa
3. Pembangunan Bak Sampah RT
4. Pembangunan Jalan Pemukiman Desa
5. Renofasi Jaringan Air Bersih Desa
6. Pasar senja
7. Organisasi Bumdes
8. Rehabilitasi Kantor Desa
9. Renofasi Gedung POSKESDES

Gambar 5.10⁵¹

**Pembangunan Rumah Singga Kawasan Wisata di Desa Pledo
Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur**



Gambar 5.11⁵²

**Pembangunan Gapura Tanda Batas Desa di Desa Pledo Kecamatan
Witihama Kabupaten Flores Timur**



⁵¹Foto dokumentasi 5.8 di ambil pada hari minggu tanggal 15 april tahun 2019 di Desa pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

⁵²Foto dokumentasi 5.9 di ambil pada hari minggu tanggal 22 april tahun 2019 di Desa pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur.

Gambar 5.12⁵³
Pembangunan Bak Sampah RT di Desa Pledo Kecamatan Witihama
Kabupaten Flores Timur



Gambar 5.13⁵⁴
Pasar senja di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur



⁵³Foto dokumentasi 5.10 di ambil pada hari minggu tanggal 17 april tahun 2019 di Desa pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

⁵⁴Foto dokumentasi 5.11 di ambil pada hari minggu tanggal 10 april tahun 2019 di Desa pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

Gambar 5.14⁵⁵
Renofasi Gedung POSKESDES dan peningkatan kapasitas kader desa
di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur



Gambar 5.15⁵⁶
Kantor BUMDES di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores
Timur



Dari beberapa gambar di atas menunjukkan bentuk-bentuk pembangunan di Desa Pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores, hal ini dapat dilihat dari Pembangunan Rumah Singga Kawasan Wisata, Pembangunan Gapura Tanda Batas Desa, Pembangunan Bak Sampah RT, Pembangunan Jalan Pemukiman Desa, Renofasi Jaringan Air Bersih Desa,

⁵⁵Foto dokumentasi 5.12 di ambil pada hari minggu tanggal 13 april tahun 2019 di Desa pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

⁵⁶Foto dokumentasi 5.13 di ambil pada hari minggu tanggal 18 april tahun 2019 di Desa pledo Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur

Pasar senja, Organisasi Bumdes, Rehabilitasi Kantor Desa dan Renofasi
Gedung POSKESDES.